

Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pendidikan Menengah Kejuruan Di Provinsi Jawa Timur

Wydha Mustika Maharani¹, Dian Marta Wati²

E-mail: wydhamustika7@gmail.com¹, missiljayasampurna@gmail.com²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Balitar

Abstract

Central Government's attention to the quality of Vocational High School graduates is increasingly visible, proven by the issuance of Presidential Instruction Number 9 of 2016 concerning the Revitalization of Vocational Education, which is essential given the rapid development of technology. Vocational High School graduates with skills in a particular field and a global perspective are needed so that the absorption of labor from SMK graduates continues to increase. Revitalization supports industrial development clusters so that its implementation also adapts to existing clusters in each region in order for vocational education to contribute directly and optimize the potential that exists in each region. Based on the expectations, potential, regulations and theories that underlie the problems of vocational secondary education, this study aims to obtain an overview of the implementation of the revitalization policy of vocational secondary education in East Java Province. This research uses descriptive qualitative method. The sample area was determined by purposive sampling by taking several Vocational High Schools in accordance with the superior potential in East Java Province. Based on the results and discussion of the research, it can be concluded that: (1) Communication has not been carried out properly, therefore, many implementing actors still do not understand the vocational revitalization area that has been designed by the Ministry of Education and Culture. 2). The number of educators and staff are not even, seen from the ratio of educators and students. Likewise, the competency of educators must continue to be improved considering the rapid development of technology in the business and industrial world. 3). The attitude of SMK towards the revitalization policy is welcoming and supportive. However, the obstacle is that many SMK complain about the difficulty of collaborating with DUDI. Only vocational high schools that have the initiative and innovative thinking are able to collaborate with DUDI. Therefore, it is necessary for East Java Provincial Education Office to bridge the cooperation between schools and DUDI.

Keywords: Policy Implementation, Revitalization, Vocational High Schools

Abstrak

Perhatian Pemerintah Pusat terhadap kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan semakin terlihat, terbukti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Pendidikan SMK. Revitalisasi pendidikan SMK sangat penting dilakukan mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Lulusan SMK dengan keterampilan di suatu bidang serta berwawasan global sangatlah diperlukan agar keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK terus meningkat. Revitalisasi mendukung klaster pengembangan industri sehingga pelaksanaan revitalisasi juga menyesuaikan dengan klaster-

klaster yang ada di masing-masing daerah agar pendidikan kejuruan SMK dapat berkontribusi langsung dan mampu mengoptimalkan potensi yang ada disetiap daerah. Berdasarkan harapan, potensi, regulasi serta teori yang mendasari permasalahan pendidikan menengah kejuruan maka tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran umum mengenai implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam menentukan wilayah sampel ditentukan secara purposive sampling dengan mengambil beberapa Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan potensi unggulan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Komunikasi belum dijalankan dengan baik sehingga banyak aktor pelaksana yang masih kurang paham akan area revitalisasi SMK yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2). Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan belum sesuai, dilihat dari rasio jumlah tenaga pendidik dengan jumlah siswa. Demikian juga kesesuaian kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik harus terus ditingkatkan mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi di dunia usaha dan dunia industri. 3). Sikap SMK terhadap kebijakan revitalisasi adalah mereka menyambut baik dan mendukung kebijakan tersebut. Namun hambatannya masih banyak SMK yang mengeluhkan sulitnya menjalin kerja sama dengan DUDI. Hanya sekolah menengah kejuruan yang memiliki inisiatif dan memiliki pemikiran inovatif yang mampu menjalin kolaborasi dengan DUDI. Sehingga dirasa perlunya peran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam menjembatani kerja sama antara sekolah dan DUDI.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Revitalisasi, Pendidikan Menengah Kejuruan*

Pendahuluan

Salah satu langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu melalui pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan vokasi merupakan bagian integral dari sektor pendidikan secara global dan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat, berkontribusi pada pengembangan individu, dan beberapa tujuan lain yang tidak dilaksanakan di sektor pendidikan lain (Maharani et al., 2021). Thompson (1973) menyebutkan bahwa *“Vocational education is economic education as it is geared to the needs of the job market and thus contributes to national economic strength.”* Oleh karena itu, melalui lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap daya saing bangsa baik dalam produk, pelayanan, maupun penyiapan sumber daya manusia.

Data BPS menunjukkan bahwa SMK di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan jumlah dari tahun ke tahun. Penambahan sekolah dilakukan oleh

pemerintah sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam rangka pemenuhan pemerataan pendidikan. Pada tahun 2017 jumlah SMK baik negeri maupun swasta yang tersebar di Provinsi Jawa Timur berjumlah 1.975 sekolah, tahun 2018 berjumlah 2.037 sekolah, dan pada tahun 2019 berjumlah 2.093 sekolah (www.jatim.bps.go.id). Dengan jumlah siswa dan jumlah lulusan yang begitu besar, diharapkan lulusan SMK yang tersedia telah memiliki kualitas yang mumpuni sehingga setiap lulusan SMK langsung mendapat pekerjaan ketika telah menyelesaikan pendidikannya.

Angka kelulusan menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan sekolah dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Angka kelulusan menjadi begitu penting bagi sekolah yang mana dapat menjadi kebanggaan sekolah yang bersangkutan dan dapat menjadi bahan promosi untuk menarik minat calon siswa baru. Namun pada kenyataannya, siswa mengulang dan putus sekolah di tingkat sekolah menengah kejuruan di Provinsi Jawa Timur jumlahnya lebih banyak jika dibanding di provinsi lain di Indonesia. Berikut jumlah siswa SMK mengulang dan putus sekolah di Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun.

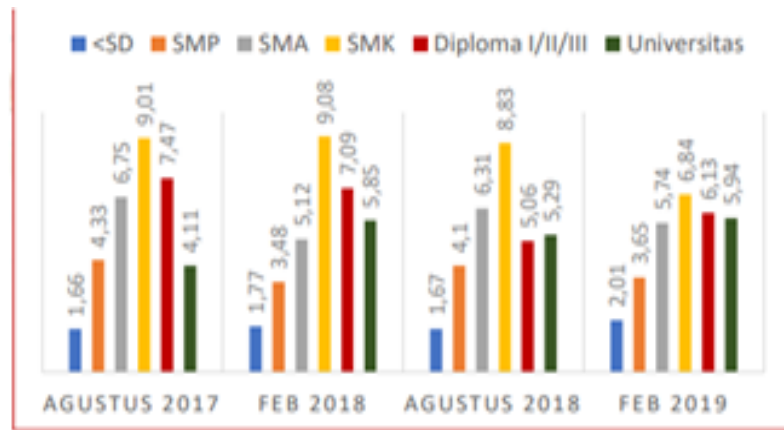
Tabel 1. Jumlah Siswa SMK yang Mengulang dan Siswa Putus Sekolah Di Provinsi Jawa Timur

Tahun Ajaran	Siswa Mengulang	Siswa Putus Sekolah
2015/2016	1.729	10.788
2016/2017	2.054	11.067
2017/2018	2.340	11.067
2018/2019	2.911	3.175

Sumber: www.datapokok.ditpsmk.net

Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Februari 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk SMK masih mendominasi diantara tingkat pendidikan yang lain. Berikut

gambar tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan.



Gambar 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Di Provinsi Jawa Timur (dalam persen)
(Sumber: www.bappeda.jatimprov.go.id, 2019)

Hal ini tentunya menjadi fenomena yang menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa lulusan SMK yang seharusnya langsung masuk ke dunia kerja karena telah dibekali keahlian khusus, justru lebih banyak berkontribusi terhadap jumlah pengangguran. Tidak sedikit masyarakat khususnya para orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah menengah kejuruan dengan harapan ketika anaknya lulus kelak akan langsung dapat memasuki dunia kerja. Nampaknya, pendidikan menengah kejuruan telah kehilangan ruhnyanya yang mana seharusnya SMK menjadi wadah untuk mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja terampil sesuai dengan bidangnya, namun yang terjadi malah sebaliknya yakni sebagai penyumbang pengangguran terbesar. Terjadinya pengangguran diakibatkan oleh lulusan SMK yang tidak terampil, tidak memiliki kompetensi keahlian sehingga tidak memenuhi harapan pasar tenaga kerja.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kayode & Adeyemi (2016) pengangguran kaum muda di Nigeria dari tahun ke tahun jumlahnya terus mengalami peningkatan. Sementara itu, keterlibatan aktif kaum muda sangat diperlukan guna memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ekonomi suatu negara yang mengarah pada pemberdayaan untuk mengatasi

tantangan ekonomi yang muncul. Sehingga pendidikan teknis dan kejuruan (TVE) dapat menjadi solusi terbaik dalam peningkatan keterampilan yang diperlukan kaum muda sebelum memasuki dunia kerja. TVE menyediakan beragam pilihan karier atau pekerjaan sebagai contoh sektor industri, pertanian, perdagangan, dan teknik. Tujuan TVE adalah memberikan keterampilan, kemampuan, pemahaman, sikap kebiasaan kerja, kompetensi, dan efektivitas yang diperlukan dalam dunia kerja. Namun, dalam praktiknya TVE dinilai kurang efektif karena kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal tersebut nampak dari kurangnya sumber daya fasilitas dan anggaran yang diperlukan. Selain itu, pelatihan yang dilakukan oleh para tenaga pengajar dinilai tidak teratur dan tidak relevan. Sehingga muncul seruan untuk merevitalisasi TVE dengan cara mendorong pemerintah, para pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan untuk menjadikan TVE sebagai program prioritas. Harapannya TVE menjadi semakin berkualitas dan mampu menciptakan peluang kerja bagi kaum muda

Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan SMK, Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla di dalam Nawacita memiliki tekad meningkatkan kualitas hidup manusia yang akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui program “Indonesia Pintar” dan “Wajib Belajar 12 Tahun” bebas pungutan. Momentum tersebut menjadikan pembelajaran 12 tahun sebagai pendidikan wajib yang harus ditempuh yang nantinya dapat berimplikasi kepada perubahan struktur tenaga kerja. Perubahan dimaksud adalah dapat mendorong perwujudan tenaga kerja Indonesia serendahnyanya berpendidikan minimal SMA/SMK. Apabila pada tahun 2015 tenaga kerja Indonesia didominasi oleh lulusan di bawah Sekolah Dasar sebesar 45,1%, maka pada tahun 2030 Pemerintah Pusat menargetkan lulusan Sekolah Dasar atau dibawahnya semakin berkurang menjadi 21,7%. Perubahan latar belakang lulusan yang bekerja yang berasal dari tingkat SMK pada tahun 2015 sebesar 9,8% dan pada tahun 2030 harapannya dapat meningkat menjadi 22,8% (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016). Penduduk dengan

pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, karena tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah.

Pengentasan kemiskinan melalui agenda pendidikan telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama dalam menyiapkan lulusan yang kompetitif, berkualitas, dan mampu bersaing dengan berbagai kondisi. Pengangguran di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan. Sehingga Gubernur Jawa Timur menggiring agar seluruh SMK di Jawa Timur lebih menyiapkan diri dalam mencetak lulusan yang siap bekerja dan berkualitas. Kebijakan publik berperan sangat penting karena proses penyelenggaraan negara senantiasa dilakukan melalui kebijakan publik (Grindle, 2004). Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik jika terdapat kebijakan yang baik (*good policy*), sedangkan kebijakan yang baik hanya akan didapatkan melalui proses kebijakan yang baik pula (*good policy process*). Berdasarkan fenomena di atas, apakah kebijakan pendidikan di Indonesia ke depan dapat meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan? Ataukah justru kebijakan pendidikan nantinya masih bersifat pencitraan, simbolis, formalitas tanpa adanya pemahaman secara komprehensif mengenai substansi dan esensi yang benar mengenai pendidikan? Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan (Zakaria, M; Mansyur, 2016).

Beberapa produk kebijakan publik yang mengatur urusan pendidikan salah satunya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana peraturan tersebut menjadi amanat konstitusi untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui fungsi desentralisasi kepada Pemerintah Daerah. Dari pemaparan isu di atas, maka disadari betapa pentingnya melaksanakan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan mengingat pengelolaan sekolah menengah kejuruan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sehingga revitalisasi akan berjalan dengan baik bila

melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tentu lebih memahami kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Proses revitalisasi mencakup perbaikan aspek fisik dan aspek ekonomi, baik dari segi bangunan maupun manajemen. Revitalisasi fisik merupakan strategi jangka pendek yang dimaksudkan untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi jangka panjang (Indahri, Y., Andina, E., Kartika, 2020).

Untuk menunjang kesiapan Pemerintah Provinsi dalam mengelola bidang pendidikan menengah kejuruan yang berada di bawah kewenangannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan regulasi berupa Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 22 Tahun 2017 tentang percepatan revitalisasi sekolah menengah kejuruan di Provinsi Jawa Timur sebagaimana diamanatkan oleh Presiden yang termuat dalam Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. Dari penerbitan Peraturan Gubernur tersebut diikuti dengan menyelaraskan peraturan pemerintah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan kebijakan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan.

Implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan karena tahapan ini sering disebut sebagai jembatan antara dunia konsep dengan dunia realita. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Grindle (2017) yang menyebut bahwa implementasi *“establish a link that allows goals of public policies to be realized as autcomes of governmental activity”*. Dunia konsep yang dimaksud di sini tercermin dalam kondisi ideal, sesuai yang dicita-citakan untuk mewujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan (Purwanto, 2015). Dari mulai diberlakukannya Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 baru memulai *pilot project* revitalisasi pendidikan menengah kejuruan. Nampaknya, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah belum banyak melakukan kesiapan. Dalam konteks implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan di Provinsi Jawa Timur, dapat diklasifikasikan beberapa instrumen yang

digunakan oleh pemerintah untuk mensukseskan program tersebut diantaranya adalah berbagai regulasi, integrasi dan sinergitas berbagai aktor diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Disnaker Provinsi Jawa Timur, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), SMK, dan dunia usaha dan industri. Interaksi dan sinergi untuk membangun kerjasama (*partnership*) dan kemitraan sehingga sekolah menengah kejuruan mampu memasuki dunia kerja lebih awal karena dalam pelaksanaan pembelajaran telah mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan dunia kerja melalui jalinan kemitraan dengan lembaga yang bersangkutan.

Namun pada kenyataannya SMK di Provinsi Jawa Timur masih banyak mengalami kesulitan membangun relasi dengan perusahaan terlebih bagi SMK swasta. Hal tersebut dapat disebabkan karena kompetensi yang dimiliki lulusan SMK swasta kurang mumpuni sehingga kurang menarik minat dunia usaha dan dunia industri untuk merekrut lulusannya. Untuk itu dibutuhkan upaya keras dari para stakeholder sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 22 Tahun 2017 Pasal 2 poin (g) bahwa untuk melakukan upaya revitalisasi pendidikan menengah kejuruan perlu mendorong peningkatan kerjasama, peran, dan partisipasi dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, pemerintah daerah serta masyarakat baik dalam proses pendidikan maupun proses penyerapan lulusan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kebijakan pengembangan SMK, khususnya SMK yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan seperti apa yang telah diimplementasikan dan implikasi apa yang muncul ketika revitalisasi SMK mulai di implementasikan dan mengharuskan adanya sinergi dengan beberapa stakeholders.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode yang mengkaji dan memecahkan persoalan serta memberikan interpretasi dari fakta yang ada. Metode deskriptif ini dilengkapi dengan daftar pertanyaan dan melalui wawancara mendalam dilakukan secara

reflektif/subyektif untuk menemukan faktor-faktor dominan yang menentukan persoalan atau permasalahan dan memberikan interpretasi terhadap permasalahan yang ada. Adapun fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan berdasarkan perspektif Edward III, yaitu (a) komunikasi yang dilakukan pada implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan; (b) sumber daya yang melakukan implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, serta sarana dan prasarana; (c) Disposisi dalam melakukan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan terdiri dari pemahaman kinerja terhadap tujuan kebijakan, kesiapan dan komitmen yang mencakup penerimaan dan tanggapan dari agen pelaksana.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, SMK Swasta Muhammadiyah 7 Gondanglegi dan SMK Negeri 1 Singosari, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang dilakukan dua kali: pertama adalah analisis di lapangan selama data pengumpulan (merumuskan ide dan telaah data) dan kedua setelah data terkumpul (data interpretasi, penyajian data dan penelusuran literatur).

Hasil dan Pembahasan

Dalam perspektif teoritis, kajian kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik dibidang pendidikan, mengatur regulasi yang berkaitan dengan penyerapan anggaran, alokasi sumber daya, distribusi sumber, dan tata tertib perilaku pendidik (Rohman, 2012). Menurut Arwildayanto et al., (2018) kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi dan misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan.

Implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan di Provinsi Jawa Timur menggunakan model dari teori yang dikemukakan oleh Edward III (1980), yang mana keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat faktor penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut memiliki indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Namun dalam peneliti ini, peneliti menggunakan tiga faktor yang dianggap sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan.

1. Komunikasi

Sebagai mana yang dikemukakan oleh Edward III (1980) bahwa *“for information to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent.”* Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah, maupun sebaliknya. Untuk menghindari distorsi informasi yang disampaikan perlu adanya dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi dari implementasi kebijakan pendidikan menengah kejuruan di Provinsi Jawa Timur mencakup:

a) Transmisi

Dalam istilah implementasi kebijakan pendidikan menengah kejuruan merupakan bentuk penyampaian atau pengiriman informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kemudian diteruskan ke pelaksana kebijakan yakni SMK baik negeri maupun swasta yang ada di Provinsi Jawa Timur dan terakhir diteruskan ke siswa dan wali murid. Bagi Humas SMKN 1 Singosari program revitalisasi akan menguntungkan bagi SMK yang mendapatkan bantuan. Namun, bagi SMK yang tidak mendapatkan bantuan revitalisasi tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah hanya memahami revitalisasi hanya sebatas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat saja. Sebagaimana yang termuat dalam Inpres No. 9 Tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan lima area revitalisasi yang mencakup revitalisasi

kurikulum, revitalisasi guru dan tenaga kependidikan, revitalisasi kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, revitalisasi sertifikasi dan akreditasi, revitalisasi sarana, prasarana, dan kelembagaan.

b) Kejelasan informasi

Informasi yang diterima oleh badan pelaksana kebijakan harus jelas dan mudah dipahami untuk memudahkan dalam mengambil tindakan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kejelasan informasi terkait dengan terlaksananya Inpres No. 9 Tahun 2016, bahwa penanggung jawab revitalisasi SMK di tingkat provinsi berada di bawah koordinasi Gubernur. Salah satu tugas Gubernur adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Namun dari hasil observasi ditemukan bahwa sebagian besar jurusan yang ada di SMK yang ada di Provinsi Jawa Timur belum sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing daerah. Rata-rata SMK membuka jurusan baru dengan landasan mengikuti tren. Pada aspek informasi dalam proses implementasi, pemerintah harus mampu memanfaatkan berbagai media sesuai dengan sasaran komunikasi dan bentuk informasinya (Alhawariy, 2021). Proses komunikasi yang baik juga didukung dengan pemahaman masalah dari pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi belum sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Tidak salah apabila banyak SMK memandang bahwa kebijakan revitalisasi hanya sebatas penerimaan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah.

c) Konsistensi informasi

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penyampaian informasi tentang kebijakan revitalisasi kurang dilakukan sehingga menjadikan kesalahpahaman bagi para aktor pelaksana baik SMK Negeri maupun Swasta yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan revitalisasi pendidikan kejuruan akan bisa dilaksanakan dengan baik, jika terdapat komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program dapat disosialisasikan dengan baik

dengan harapan bisa menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program sudah ditetapkan. Ini sangat penting asumsinya, semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penloakan dan kekeliruan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sesungguhnya (Arwildayanto et al., 2018). Proses penyaluran informasi tersebut dapat dilaksanakan lebih baik dengan adanya peran aktif dari penerima informasi untuk memberikan umpan balik.

2. Sumber Daya

Faktor kedua adalah kondisi sumber daya pendukung. Sebagai mana yang dikemukakan oleh Edward III (1980) bahwa *“important resources include staff the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services.”* Sumber daya ini terkait dengan seluruh sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan di Provinsi Jawa Timur yang meliputi:

a) Sumber daya manusia

Implementasi kebijakan sangat membutuhkan dukungan dari ketersediaan sumber daya manusia yang kualitas dan kuantitasnya mencukupi. Sumber daya manusia yang bermutu berkaitan dengan ketrampilan, dedikasi, profesionalisme, dan memiliki kompetensi di bidangnya. Jika dilihat dari sisi kuantitas, Humas SMK Swasta Muhammadiyah 7 Gondanglegi menyebutkan bahwa jumlah guru di sekolahnya masih belum mencukupi. Selama ini mereka memanfaatkan guru yang sudah ada dengan memberikan pekerjaan ganda/merangkap pekerjaan lain. Namun bagi sekolah swasta hal tersebut dirasa menguntungkan bagi guru yang bersangkutan karena berpengaruh terhadap insentif yang diberikan.

Sedangkan jika dilihat dari sisi kualitas, sekolah wajib mendatangkan pakar sesuai bidang yang diperlukan untuk mengisi seminar, workshop, webinar. Kemudian guru wajib melakukan magang pada dunia usaha dan dunia industri, serta sekolah berkenan menyekolahkan para guru ke jenjang magister. Menurutny Pemerintah Provinsi Jawa Timur jarang sekali mengadakan pelatihan, sehingga sekolah harus memiliki inisiatif untuk meningkatkan kualitas bagi para guru. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan guru produktif SMK berdasarkan bidang keahlian yang ada jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal memperlihatkan bahwa SMK baik negeri maupun swasta di Provinsi Jawa Timur masih mengalami kekurangan guru produktif. LPTK sebagai lembaga pencetak guru saat ini mengalami tantangan dalam hal menghasilkan calon guru yang profesional serta tantangan kebijakan pemerintah terkait pengadaan guru. Calon guru SMK dihadapkan pada fasilitas dan sarana pembelajaran di kampus yang mulai tertinggal dan dikhawatirkan akan mengganggu penguasaan ketrampilan mengajar guru produktif kelak di SMK. Mahasiswa calon guru yang minim pengalaman kerja di dunia usaha dan industri dikhawatirkan kurang menghayati dunia kerja yang sesungguhnya. Oleh karenanya, LPTK perlu menjalin kemitraan antara LPTK, SMK, dan dunia usaha dan dunia industri (Indahri, Y., Andina, E., Kartika, 2020).

b) Sumber daya anggaran

Dalam kaitannya dengan sumber keuangan, Humas SMK Swasta Muhammadiyah 7 Gondanglegi menyampaikan bahwa sumber keuangan sekolah mereka berasal dari penerimaan bantuan dana revitalisasi dari Pemerintah Pusat. Jika bantuan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sekolah maka sekolah harus berupaya memenuhi kekurangan kebutuhannya yang didapat dari siswa dan menjalin kerja sama dengan Bank untuk dapat mengajukan pinjaman. Arus keuangan perlu dijaga dengan baik, usaha tersebut dapat dilakukan dengan menjalankan aktivitas pendukung yang sesuai dengan jurusan dan sesuai dengan aturan pendidikan (Mahadi & Konadi, 2020).

c) Prasarana dan fasilitas penunjang pembelajaran

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa fasilitas dan infrastruktur merupakan faktor pelengkap dalam implementasi revitalisasi pendidikan menengah kejuruan. Humas SMK Swasta Muhammadiyah 7 Gondanglegi menuturkan bahwa setelah dilakukannya revitalisasi semua sarana dan fasilitas penunjang pembelajaran disesuaikan dengan standar dunia usaha dan dunia industri. Untuk pengadaan sarana dan fasilitas penunjang, dananya berasal dari pembayaran SPP dan praktek siswa. Saat ini fasilitas yang diberikan pada kelas sudah cukup optimal dan mampu menompang semua proses pembelajaran seperti ketersediaan kelas yang berstandar dunia usaha dan dunia industri dan laboratorium yang representatif. Kekurangan sarana dan prasarana bukan saja akan membebani keuangan negara di masa yang akan datang, tetapi juga membuat proses pembelajaran tidak optimal sehingga merugikan siswa. Perkembangan teknologi juga memaksa proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis digital atau *e-learning*. Penerapan *e-learning* membutuhkan persiapan yang matang sehingga esensi pendidikan masih dapat terlaksana (Mangkuto & Widiyanto, 2019).

3. Disposisi

Faktor ketiga adalah disposisi. Berkaitan dengan bagaimana sikap para implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan. Sikap tersebut dipengaruhi oleh sejauh mana wewenang yang dimiliki dan keuntungan apa yang didapat (insentif) bagi para stakeholder. Dikutip dari bukunya Edward III (1980) bahwa *“The dispositions or attitudes of implementors is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy.”* Sikap dan komitmen dari pelaksana

kebijakan adalah suatu keharusan yang harus mereka miliki untuk dapat mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Rata-rata pihak sekolah mendukung akan kebijakan revitalisasi karena kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap perkembangan SMK. Pihak sekolah memiliki kemauan dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan secara serius. Namun dari hasil observasi ditemukan bahwa beberapa sekolah mengaku kesulitan menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Hal tersebut disebabkan belum ada kesepahaman antara pihak SMK dengan DUDI. Beberapa SMK masih memandang bahwa kerja sama dengan DUDI tidak berdampak pada tingkat kelulusan dan peringkat SMK di tingkat daerah dan nasional. Sementara DUDI masih menganggap kerja sama dengan SMK merupakan beban dan tidak memberikan nilai manfaat yang memadai secara ekonomi. Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani maka keberhasilan revitalisasi pendidikan menengah kejuruan tidak akan terwujud.

Dikutip dari Boateng (2012) bahwa *“Revitalization is needed, however, it requires commitment from various parties to unite to implement it. There must be synergy between various institutions, government and private agencies to be able to realize the stages contained in the roadmap that has been established.”* Sebagaimana pernyataan Suharno et al., (2020) bahwa *“Industries should be encouraged to be involved in vocational education development. There is an impression that industries in Indonesia only demand for the availability of skilled workers, but do not contribute to making this happen, which is different from practices in developed countries. Germany, the USA, the UK, Japan, Singapore, and Scotland are some of the countries which enforce strict sanctions for companies that do not contribute to vocational schools.”*

Bagi sekolah yang memiliki komitmen yang tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini salah satunya SMK Swasta Muhammadiyah 7 Gondanglegi upaya yang dilakukan adalah mereka sering melakukan pendekatan kepada industri, melibatkan industri disetiap kegiatan (Expo yang menampilkan hasil karya siswa), mendatangkan DUDI untuk mengisi materi *workshop*, diklat sehingga keberadaan DUDI merasa dihargai

dan dibutuhkan, pada akhirnya DUDI mau menjalin kerja sama sebagai mitra SMK. Keuntungan yang didapat bagi DUDI dalam proses kerja sama dengan SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi adalah ketersediaan calon tenaga kerja yang kompetensinya tidak kalah dengan lulusan setingkat diploma dan sarjana. Dengan merekrut lulusan setingkat SMK gaji yang diberikan lebih rendah jika dibanding lulusan setingkat diploma atau sarjana. Itulah keuntungan yang didapat industri. Lain jika industri merekrut dari lulusan diploma atau sarjana, pasti gaji yang diminta akan lebih tinggi dan belum tentu juga mereka memiliki kompetensi seperti lulusan SMK. Umumnya industri lebih tertarik merekrut lulusan dari SMK untuk diposisikan pada bagian teknis.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Komunikasi belum dijalankan dengan baik sehingga banyak aktor pelaksana yang masih kurang paham akan area revitalisasi SMK yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga peneliti merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peta jalan pengembangan pendidikan kejuruan dan mensosialisasikan kepada semua stakeholders di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sehingga informasi akan kebijakan revitalisasi dapat diterima dan dipahami oleh semua aktor pelaksana. 2). Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan belum sesuai, dilihat dari perbandingan rasio jumlah tenaga pendidik dengan jumlah siswa. Demikian juga kesesuaian kompetensi yang dimiliki tenaga pendidik harus terus ditingkatkan mengingat semakin pesatnya perkembangan teknologi di dunia usaha dan dunia industri. 3). Sikap SMK terhadap kebijakan revitalisasi adalah mereka menyambut baik dan mendukung kebijakan tersebut. Namun hambatannya masing banyak SMK yang mengeluhkan sulitnya menjalin kerja sama dengan DUDI. Hanya sekolah menengah kejuruan yang memiliki inisiatif dan memiliki pemikiran inovatif yang mampu menjalin kolaborasi dengan DUDI. Sehingga dirasa perlunya peran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam menjembatani kerja sama antara sekolah dan DUDI.

Referensi

- Alhawariy, S. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 62–81. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5171/3622>
- Boateng, C. (2012). Restructuring Vocational and Technical Education in Ghana: The Role of Leadership Development. *International Journal of Humanities and Social Science*.
- Dr. Arwildayanto, M. P., Dr. Arifin Sukung, M. P., & Dr. Warni Tune Sumar, S.Pd., M. P. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. In *Kebijakan Publik*. (Vol. 53, Issue 9).
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. In *Governance* (Vol. 17, Issue 4). <https://doi.org/10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x>
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the third world. In *Politics and Policy Implementation in the Third World*. <https://doi.org/10.2307/2619175>
- Indahri, Y., Andina, E., Kartika, S. (2020). *Sekolah Menengah Kejuruan dan Tantangan Revitalisasi*. Pusat Penelitian Badan Keahlian.
- Kayode, A. A., & Adeyemi, A. O. (2016). Revitalization of Technical and Vocational Education for Youth Employment and Poverty Alleviation. *International Journal of Educational Sciences*, 13(3), 262–270. <https://doi.org/10.1080/09751122.2016.11890460>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Revitalisasi Pendidikan Vokasi*.
- Mahadi, & Konadi, W. (2020). PENGARUH ANGGARAN PENDIDIKAN, KUALITAS PENDIDIK DAN AKREDITASI SEKOLAH TERHADAP KUALITAS LULUSAN (STUDI KASUS SMA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2017-2019). *Indomera: Jurnal Magister Manajemen*, 1(2), 44–61.
- Maharani, W. M., Zauhar, S., Makmur, M., & Haryono, B. S. (2021). *Blended Learning on Vocational High School in Adaptation of New Habit Era with Whole of Government Approach*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210928.098>
- Mangkuto, A. R., & Widiyanto, M. K. (2019). Implementasi Kebijakan E-Learning dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1226–1231. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/2963>
- Purwanto, E. . & S. D. . (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Aswaja Pressindo.
- Suharno, Pambudi, N. A., & Harjanto, B. (2020). Vocational education in Indonesia: History, development, opportunities, and challenges. In *Children and Youth Services Review*. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105092>
- Thompson, J. F. (1973). *Foundations of Vocational Education: Social and*

Philosophical Concepts. Prentice Hall, Inc.
Zakaria, M; Mansyur, M. (2016). *Implementasi Kebijakan publik: Strategi Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.